

## **PENGAJIAN AUDIT SOSIAL DALAM FASILITASI PERKUATAN SENTRA BISNIS UKM (2003)**

Pada hakikatnya pemberdayaan ekonomi rakyat identik dengan pemberdayaan UKM sebagai pelaku ekonomi yang secara nyata berperan strategis dalam perekonomian nasional. Karena itu, UKM harus dikelola dan dikembangkan secara produktif, mengikuti perubahan-perubahan dalam tata ekonomi global, dan dikembangkan menjadi pelaku bisnis yang memiliki daya saing tinggi. Dalam hal ini, UKM mengikuti kecenderungan perubahan pasar dan mampu memanfaatkan teknologi, mulai dari yang sederhana hingga teknologi yang mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi.

Salah satu bentuk pemberdayaan UKM yang sudah dirintis dan dilaksanakan adalah pengembangan UKM melalui pendekatan sentra bisnis. Pada dasarnya pendekatan sentra ini untuk memberi perkuatan agar dinamika sentra dapat tumbuh menjadi klaster bisnis melalui perkuatan tiga komponen, yaitu: dukungan nonfinansial, advokasi, dan dukungan finansial sebagai penggerak awal. Prinsip dasar pemberdayaan UKM melalui strategi ini, antara lain untuk meningkatkan fokus agar lebih terarah, melakukan proses transformasi pembinaan UKM agar menjadi sebuah industri jasa yang dapat dilakukan oleh swasta secara profesional, dan terjadinya proses perguliran secara berkelanjutan, termasuk perguliran dana.

Strategi pengembangan UKM dengan pendekatan sentra diharapkan dapat mempercepat pengembangan masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Hal ini sejalan dengan: a) UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, b) UU Nomor 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), dan c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32/1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

Pada saat ini, terdapat kurang lebih 9.800 unit sentra UKM dengan tingkat perkembangan derajat keterkaitan dalam klaster umumnya masih rendah, jumlah unit UKM yang terpantau dalam sentra sebagai embrio klaster tersebut diperkirakan mencapai 475.000. Dilihat dari penyebaran, sekitar 58% sentra berada di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Ditinjau dari kegiatan yang dikelolanya, umumnya pengelompokan sentra berada di sektor yang berkaitan dengan industri, seperti industri pengolahan makanan dan minuman. Sampai saat ini, jumlah sentra tersebut sudah mencapai 432 sentra. Agar sentra ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan di masing-masing sentra, ditunjuk lembaga pelayanan bisnis yang lebih dikenal dengan *Business Development Services Provider (BDS-P)*. Lembaga BDS-P ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada sentra sesuai dengan program-program pelaksanaannya. Di antara program-program tersebut adalah perkuatan dukungan finansial, yaitu perguliran dana MAP, pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pengembangan usaha UKM, serta pelayanan jasa lainnya yang bersifat nonfinansial.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan kajian audit sosial terhadap fasilitasi perkuatan sentra untuk mendapatkan rekomendasi bagi perumusan kebijakan pembinaan yang efektif dan dapat dirasakan manfaatnya bagi sentra UKM, pelaku UKM, dan masyarakat sekitarnya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal, maka dianggap perlu melakukan pengkajian audit sosial terhadap fasilitasi perkuatan sentra UKM di Indonesia.

Tujuan dari kajian ini adalah: 1) mengetahui tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana (*resources system*) dalam sentra bisnis UKM; 2) mengetahui dampak sentra terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Adapun sasaran dari kajian ini adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi sentra, UKM, dan masyarakat sekitarnya dengan menggunakan metode audit sosial, dengan harapan

dapat diperoleh solusi yang efektif yang dapat dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM dalam memecahkan permasalahan, sekaligus melakukan perbaikan program pengembangan sentra lebih lanjut.

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode survai dengan pendekatan kualitatif, yang ditunjang dengan data kuantitatif dan studi kasus. Inti audit sosial dengan menggunakan metode kuantitatif dalam kajian ini diharapkan menghasilkan data deskriptif. Metode audit sosial merupakan satu paket kegiatan yang perlu dilakukan dengan tujuan untuk menguji atau menilai dari aspek sosial terhadap pelayanan-pelayanan program sentra bisnis UKM secara sistematis. Untuk pengumpulan data primer dan sekunder, digunakan alat/ instrumen kuesioner sebagai pedoman wawancara dan pengamatan lapangan.

Metode Audit Sosial ini digambarkan dalam ruang lingkup kajian seperti di bawah ini :

No	Sasaran Audit Sosial	Kegiatan yang Diaudit
1	Semua bentuk dan kegiatan program yang telah direncanakan dan dilaksanakan di sentra UKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil klien yang dilibatkan dalam program</li> <li>2. Ringkasan program yang diberikan</li> <li>3. Beban staff yang bertugas</li> <li>4. Rencana dan realisasi program</li> <li>5. Hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan</li> </ol>
2	Pelaku atau pelaksana program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi terhadap kegiatan yang telah dikerjakan</li> <li>2. Tingkat kepuasan dan ketidakpuasan</li> </ol>
3	Kelompok masyarakat yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian terhadap semua kegiatan yang diterima</li> <li>2. Tingkat kepuasan dan ketidakpuasan</li> </ol>
4	Masyarakat sekitar yang tidak atau belum terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian terhadap semua proyek kegiatan yang diketahui</li> <li>2. Tingkat kepuasan dan ketidakpuasan</li> </ol>

Dari hasil kajian audit sosial, dapat disimpulkan bahwa lembaga BDS merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada sentra, sesuai dengan program-program yang sudah tersusun, di antaranya: dukungan finansial berupa dana MAP, pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pengembangan usaha UKM dan pelayanan jasa lainnya yang bersifat nonfinansial. Semua dukungan atau perkuatan tersebut memberikan nilai tambah bagi pengembangan usaha UKM, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar.

Adapun permasalahan yang dirasakan oleh para pelaku UKM di antaranya adalah dominasi pemerintah agaknya berkurang, tetapi pemain baru yang melakukan potongan diserahkan kepada BDS. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan terhadap kinerja BDS, sentra, koperasi maupun UKM, dan meningkatkan hubungan koordinasi antarlembaga tersebut, sehingga dapat dilakukan pengawasan secara terpadu terhadap pengelolaan koperasi dan UKM. Dengan demikian, masyarakat berpartisipasi dan memberikan kontribusi secara aktif dalam proses pembangunan serta mendapat manfaat secara adil dari hasil pembangunan. Partisipasi ini mengandung makna yang menghendaki keterlibatan masyarakat secara sukarela dan demokratis, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam kegiatan pembangunan, berperan dalam pengambilan keputusan, formulasi kebijakan dan perencanaan, serta pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi di wilayahnya.

Keberadaan BDS, sentra UKM, dan koperasi di tengah-tengah para pengusaha kecil dan menengah, secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Dampak yang secara langsung di antaranya dapat ditunjukkan dari:

- ◆ membuka peluang kerja;
- ◆ meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM;
- ◆ meningkatkan pendapatan masyarakat;

- ◆ meningkatkan persediaan kebutuhan pokok;
- ◆ memasarkan hasil produksi;
- ◆ menjadi pusat data dan informasi bagi anggota dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Rekomendasi kajian audit sosial dalam fasilitasi perkuatan sentra bisnis UKM, antara lain perlu kebijakan dan strategi untuk meningkatkan hubungan antarlembaga baik di tingkat pusat maupun daerah, badan/dinas tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan sebagai hubungan struktural dan pemerintahan, serta BDS sebagai pendamping sentra, koperasi dan masyarakat. Segenap unsur yang terlibat seharusnya memahami permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan koperasinya.